

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang mempunyai banyak usaha dan pembangunan disegala bidang yang mendukung perkembangan ekonomi agar semakin bertumbuh. Salah satu usaha untuk membantu perkembangan ekonomi tersebut yaitu dengan adanya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Indonesia. Kegiatan UMKM itu sendiri memiliki peran penting dalam mempertahankan kegiatan ekonomi lokal, dengan semua karakteristiknya, UMKM mampu memberikan banyak pilihan kegiatan ekonomi yang sangat dibutuhkan oleh produsen, konsumen dan pemerintah Indonesia (Indrawan et al., 2018).

Pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi Indonesia sangat dipengaruhi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang juga menjadi fokus utama pembangunan ekonomi negara. Perusahaan swasta yang tidak memenuhi syarat sebagai cabang atau anak perusahaan dari organisasi yang lebih besar dan memenuhi kriteria modal kerja terbatas disebut sebagai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Perekonomian bangsa dapat memperoleh manfaat besar dari gagasan strategis dan kerja keras usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang dapat menumbuhkan basis ekonomi dan berdampak besar. Perjuangan pemerintah melawan kemiskinan dan pengangguran juga akan mendapat manfaat

dari hal ini. Selain itu, UMKM mengolah sumber daya alam lokal dengan cara tersebut (Nurhidayah, 2021).

Memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar mendorong persaingan dan pola pikir kewirausahaan. Karena UMKM sudah ada, pertumbuhan dan produksi dapat ditingkatkan. Terdapat hambatan pertumbuhan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) karena kegagalan kelembagaan dan pasar keuangan, meskipun usaha tersebut rata-rata mengungguli usaha besar. Usaha kecil dan menengah (UKM) lebih mampu meningkatkan lapangan kerja daripada perusahaan raksasa karena tenaga kerja mereka yang lebih besar. Oleh karena itu, setiap upaya untuk mendukung UMKM akan berdampak berlipat ganda pada upaya menurunkan kemiskinan dan mendorong pembangunan ekonomi (Syahputra & Hasibuan, 2019).

UMKM memegang peranan penting dan vital dalam pembangunan perekonomian suatu bangsa. Pembangkitan investasi nasional, pertumbuhan PDB, penyerapan tenaga kerja, dan penciptaan devisa merupakan beberapa manfaat yang diberikan oleh UMKM. Jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia berjumlah 64 juta pada tahun 2018. Enam puluh satu persen PDB Indonesia berasal dari UMKM. Selain itu, UMKM mempekerjakan sebagian besar tenaga kerjahingga 97% dari seluruh pekerja dalam operasionalnya (Ferdiansyah & Bukhari, 2021).

Pertama, banyaknya UMKM yang tersebar di perkotaan, pedesaan, bahkan pelosok, menjadikan UMKM berpotensi menjadi penopang perekonomian nasional. Kedua, pelaku usaha UMKM dapat meningkatkan pendapatannya dan

menciptakan lapangan kerja baru karena kualitas dan daya ciptanya yang tinggi. Ketiga, tingginya minat masyarakat Indonesia terhadap bisnis UMKM di sektor pertanian, sehingga tanpa disadari menjadi salah satu sumber daya pendorong pertumbuhan bangsa. Keempat, bisnis UMKM tidak memerlukan pendidikan tinggi, artinya masyarakat Indonesia yang berpendidikan rendah tetap bisa mendirikan perusahaan sendiri (Rahmayanti *et al.*, 2023).

Meskipun terdapat banyak UMKM di Indonesia, namun jumlah yang dibutuhkan jauh lebih sedikit. Hanya sekitar 2.000 dari 60.000 UMKM yang resmi terdaftar sebagai wajib pajak yang benar-benar membayar pajaknya, seperti dilansir Munthe dkk. (2021). Jumlah tersebut berarti kurang dari 3,3 persen dari 60 juta UMKM yang membayar pajak. Hal ini menunjukkan dua hasil potensial. Pertama, seberapa kuat pelaku UMKM menentang perpajakan sebagai bentuk patriotisme? Fakta bahwa para pelaku UMKM merasa terpaksa untuk mengatasi permasalahan pandemi yang lebih kritis juga disebutkan (Rahmayanti *et al.*, 2023).

Tercapainya target penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh peran wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak. Karena pajak dimaksudkan untuk mendanai kepentingan publik dan bukan kepentingan pribadi, maka wajib pajak tidak mendapatkan keuntungan langsung dari kontribusi pajaknya. Pemerintah pusat dan daerah sama-sama mengandalkan pajak sebagai salah satu sumber pendanaan pembangunan. Salah satu hal yang dikenakan pajak oleh orang, organisasi, dan bisnis adalah pendapatan mereka. Salah satu jenis objek pajak yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (Asniar Pardede, 2022).

Operasional dan pembangunan pemerintah sangat bergantung pada uang negara yang bersumber dari pajak. Kepatuhan Wajib Pajak terhadap persyaratan pengajuan merupakan komponen utama dalam mencapai tujuan pemungutan penerimaan negara. Namun kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih buruk dibandingkan negara lain. Fakta bahwa hanya 64,7% wajib pajak yang membayar pajak secara adil pada tahun 2023 menjadi buktinya, menurut data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

Penelitian ini menyoroti pengetahuan pajak sebagai faktor pertama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan Wajib Pajak untuk mengetahui aturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan Undang-Undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak berguna bagi kehidupan mereka (Mulyati & Ismanto, 2021). Pengetahuan perpajakan atau pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak harus meliputi:

1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia
3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan

Salah satu penyebab rendahnya tingkat kepatuhan pajak adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pajak. Khususnya di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perorangan, pemahaman wajib pajak terhadap aturan dan ketentuan perpajakan masih rendah. Kurangnya pengetahuan pajak, di kalangan pelaku UMKM perorangan, menjadi salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap rendahnya tingkat kepatuhan pajak. Namun, Wajib

pajak akan meningkat seiring bertambahnya pengetahuan pajak seseorang karena dengan pengetahuan pajak yang tinggi para wajib pajak sadar akan kewajibannya dan tahu akan akibatnya jika tidak memenuhi kewajibannya (Hertati, 2021).

Tarif pajak adalah faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak adalah presentase untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Penetapan tarif harus berdasarkan pada keadilan dan pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada Wajib Pajak yang harus sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak (ability to pay) dan sesuai dengan manfaat yang diterima (Sari et al., 2021). Ada juga yang berpendapat bahwa wajib pajak cenderung tidak patuh karena tarif pajak yang tinggi. UMKM perorangan memiliki tantangan yang signifikan dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, sebagian besar terkait dengan kekhawatiran mengenai tarif pajak yang tinggi. Apabila wajib pajak merasa tarif pajak yang dikenakan tidak sesuai akan menimbulkan wajib pajak untuk menggelapkan pajaknya karena tarif yang dipungutnya terlalu besar. Tarif yang besar akan membuat seseorang beranggapan bahwa membayar pajak akan menambah beban karena penghasilan yang didapat akan berkurang, sehingga berusaha untuk mengecilkan jumlah pajaknya dengan melakukan tindakan penggelapan pajak (Auliana & Muttaqin, 2023). Tapi semakin pemerintah adil dalam menetapkan besarnya tarif pajak, Wajib Pajak akan semakin memahami persepsi terhadap tarif pajak yang diberlakukan, sehingga semakin tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Raharjo et al., 2020).

Sanksi pajak adalah faktor ketiga yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dikarenakan sanksi dapat memaksa orang untuk mematuhi kesepakatan atau peraturan (Mianti & Budiwitjaksono, 2021). Selain itu, sanksi pajak yang dikenakan belum cukup untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena sanksi perpajakan yang berlaku saat ini masih terbilang ringan dan belum efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Penting untuk menganalisis kondisi ini secara menyeluruh.

Kepatuhan pajak yang tidak memadai dapat menghambat pembangunan nasional dan merusak stabilitas keuangan. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana kepatuhan wajib pajak pada UMKM tertentu di Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan.

Berangkat dari hal yang disebutkan di atas, pengetahuan pajak, tarif pajak, sanksi pajak sangat dibutuhkan untuk petahuan wajib pajak. Hal inilah yang melatar belakangi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada UMKM Orang Pribadi Di Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Tantangan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut, dengan memperhatikan sejarah yang disebutkan di atas:

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (UMKM)?
2. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (UMKM)?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (UMKM)?
4. Apakah pengetahuan pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (UMKM)?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap wajib pajak orang pribadi UMKM di Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi.
2. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap wajib pajak orang pribadi UMKM di Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap wajib pajak orang pribadi UMKM di Kelurahan Kranji Bekasi Barat Kota Bekasi.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap wajib pajak orang pribadi UMKM di Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, temuan penelitian ini seharusnya mampu memberikan wawasan mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Dapat memperluas pemahaman dan menerapkan teori-teori yang dipelajari melalui proyek penelitian dan perkuliahan, serta menyebarkan teori-teori tersebut.

b. Bagi Pedagang

Kami berharap dengan melakukan penelitian ini, kami dapat lebih memahami variabel-variabel apa saja yang ada di Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi yang mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan cara terbaik untuk mendukungnya. kepatuhan wajib pajak secara individual. meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi.

c. Bagi Perguruan Tinggi

Program studi akuntansi Universitas Bhayangkara di Jakarta Raya dapat menggunakan hal ini sebagai acuan dan titik pembanding untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Tugas Akhir

Penyusunan penelitian memerlukan gambaran mengenai sistematika penulisan yang terdiri dari beberapa bab yang saling berkaitan agar lebih terarah dan dapat dijadikan acuan pokok penyusunan skripsi. Berikut sistematika penulisan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Penyusunan penelitian memerlukan gambaran mengenai sistematika penulisan yang terdiri dari beberapa bab yang saling berkaitan agar lebih terarah dan dapat dijadikan acuan pokok penyusunan skripsi. Berikut sistematika penulisan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Kerangka konseptual, hipotesis penelitian, studi empiris, tarif pajak, hukuman, pemahaman tentang pajak, dan penelitian tentang perusahaan mikro, kecil, dan menengah adalah bagian dari studi literatur yang berkaitan dengan subjek yang ada. (UMKM) Kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode analisis data dan pengujian hipotesis dibahas dalam bab ini bersama dengan metodologi penelitian, sampel dan populasi, sumber dan jenis data, variabel operasional dan skala pengukuran.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Informasi mengenai temuan, analisis, dan pembahasan penelitian dapat ditemukan dalam bab ini.

BAB V PENUTUP

Bagian ini merinci interpretasi penulis terhadap penelitian, termasuk hasil, batasan, implikasi pengelolaan, dan saran, serta kesimpulan yang diambil dari penelitian.

